

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di atas, ditemukan banyak kekurangan pada implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Dilihat dari *Content Policy* Perwal Pengendalian Plastik, masih ada kekurangan dari poin pelaksana kebijakan dan sumber daya yang dilibatkan. Pihak yang berpartisipasi aktif dari pemerintah hanya DLH Kota Semarang dan Biro Komunikasi dan Protokol Kota Semarang lewat Gerakan Semarang Wegah Nyampah. Untuk mencapai keberhasilan kebijakan pengendalian plastik, tentunya harus melibatkan banyak institusi pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya kecamatan dan kelurahan. Tujuannya adalah untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Tidak dilibatkannya institusi penegak hukum seperti Satpol PP menyulitkan pemerintah untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku usaha yang melanggar Perwal Pengendalian Plastik

Context Policy dalam Perwal Pengendalian Plastik juga terdapat banyak kekurangan. Poin ini lebih berfokus pada pelaksana kebijakan yang mana melihat bagaimana strategi pelaksanaan kebijakannya,

karakteristik lembaga pelaksana kebijakan, dan daya tanggap pelaksana kebijakan. Ketiga poin tersebut masih ditemui banyak kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pelaksana teknis kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam menjalankan Perwal Pengendalian Plastik. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi saja tanpa penegakan hukum yang tegas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sosialisasi dibantu oleh Biro Komunikasi dan Protokol Kota Semarang lewat Gerakan Semarang Wegah Nyampah yang lebih kapabel dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan. SWN mampu melaksanakan berbagai kegiatan tanpa menggunakan anggaran pemerintah dan masyarakat simpatik dengan apa yang dilakukan oleh Gerakan SWN. Namun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan produk plastik sekali pakai karena fakta di lapangan menunjukkan produk plastik sekali pakai masih banyak beredar.

Penegakan hukum juga menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik. Salah satu contohnya adalah Perwal Pengendalian Plastik mengatur sanksi bagi penyedia produk plastik sekali pakai apabila melanggar ketentuan yang tertera di dalam Perwal. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang

memberlakukan larangan plastik sekali pakai kepada sektor retail saja seperti minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Untuk sektor umkm diberikan pengecualian karena pemerintah beralasan bahwa penerapan aturan melihat keadaan lapangan. Tentu ini menimbulkan pertanyaan mengapa Perwal ini disusun namun tidak bisa dilaksanakan. Kelemahan lain. Contoh lain kelemahan lain pelaksanaan Perwal Pengendalian Plastik adalah pemerintah mewajibkan para pelaku usaha untuk mengganti plastik sekali pakai dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, namun pemerintah tidak mengakomodir itu dengan menyediakan produk ramah lingkungan yang harganya bersaing dengan plastik sekali pakai. Akibatnya para pelaku usaha lebih menggunakan produk plastik sekali pakai karena harganya jauh lebih murah dan masih tersedia di pasaran.

4.2. Saran

Penelitian ini melihat bagaimana Pemerintah Kota Semarang melaksanakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik menggunakan perspektif Grindle. Ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara kebijakan yang sudah dibuat dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Hal yang harus disorot adalah kurangnya ketegasan dan adaptasi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Harapannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pelaksana teknis Perwal

Pengendalian Plastik melakukan evaluasi agar penerapan kebijakan lebih tegas agar nantinya tujuan dari Perwal Pengendalian Plastik tercapai.

Untuk Pemerintah Kota Semarang, saran saya adalah untuk mencapai tujuan kebijakan jangka panjang seperti Perwal Pengendalian Plastik, dibutuhkan ketegasan, adaptasi, dan inovasi. Kebijakan ini berusaha merubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat karena merubah kebiasaan masyarakat bukanlah hal yang mudah dicapai daripada menciptakan kepatuhan dengan paksaan.